

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI UNTUK MENCIPTAKAN PETANI UNGGUL DI DESA RAMBAH HILIR TENGAH GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Wiwin Sahara<sup>1</sup>, Seprini<sup>2</sup>, Arfianti Novita Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Indonesia

[wiwin.saharaps@gmail.com](mailto:wiwin.saharaps@gmail.com)

[seprinimyd@gmail.com](mailto:seprinimyd@gmail.com)

[wantdvee@gmail.com](mailto:wantdvee@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the role of the village government in empowering farming communities to create superior farmers in Rambah Hilir Tengah Village to support food security. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of this study show that in the aspect of the regulator, the village government does not make rules regarding the empowerment of farming communities, but only realizes the rules that have been issued by the central government, as well as the lack of public knowledge about clear rules regarding guidelines for empowerment to farming communities. In the aspect of dynamizers, the sub-indicators are not said to be optimal as a whole, there are obstacles such as limited support personnel and lack of technical training, and the village government has not played an active role in conducting field visits. The role of the village government as a facilitator in the provision of seeds, fertilizers and production facilities and infrastructure that have been running in accordance with the needs of the farming community. The empowerment of the farming community in Rambah Hilir Tengah Village is still in the formation stage and has not been fully optimal in creating superior farmers. The food security condition of the community in Rambah Hilir Tengah Village is at a level that is still vulnerable and not yet fully strong.*

**Keywords:** *The Role of the Village Government, Community Empowerment, Superior Farmers, Food Security*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Untuk Menciptakan Petani Unggul Di Desa Rambah Hilir Tengah Guna Mendukung Ketahanan Pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek regulator pemerintah desa tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan masyarakat petani, melainkan hanya merealisasikan aturan yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang aturan yang jelas mengenai pedoman pemberdayaan kepada masyarakat petani. Pada aspek dinamisator belum secara keseluruhan sub indikator dikatakan optimal, terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga pendamping dan minimnya pelatihan teknis, serta pemerintah desa belum berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan. Pada peran pemerintah desa sebagai fasilitator penyediaan bibit, pupuk serta sarana dan prasarana produksi yang sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah masih dalam tahap pembentukan dan belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan petani unggul. Kondisi ketahanan pangan masyarakat di Desa Rambah Hilir Tengah berada pada tingkat yang masih rentan dan belum sepenuhnya kuat.

**Kata kunci:** Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Petani Unggul Ketahanan Pangan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sejak dahulu hingga saat ini masih identik dengan sebagian mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian atau bercocok tanam. Namun demikian, pada masa sekarang ini Indonesia justru mengalami permasalahan yang cukup kompleks dalam aspek ketahanan pangan, yang merupakan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong kenaikan kebutuhan terhadap pangan, energi, dan sumber daya air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keharusan. Ketahanan pangan berperan penting dalam kehidupan manusia, yaitu menjadi prasyarat mutlak (Nelsi *et al.*, 2024). Sebagai negara agraris dengan ketersediaan lahan pertanian yang sangat luas, Indonesia seharusnya menempati posisi teratas dalam indeks ketahanan pangan global (Wuli, 2023). Tapi faktanya, berdasarkan hasil penelitian Economist Impact dalam Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) yang rilis pada tahun 2022 Indonesia hanya menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dan berada pada peringkat ke-5 diantara negara ASEAN (Economist Impact, 2022).

Desa Rambah Hilir Tengah merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, sebagian besar penduduknya juga bermata pencaharian pertanian. Jenis pertanian yang ada di desa Rambah Hilir Tengah yaitu pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung dan singkong. Pertanian hortikultura seperti cabai, labu, bayam, kangkung, dan kacang panjang juga merupakan jenis pertanian yang ada di desa Rambah Hilir Tengah. Berikut disajikan data jumlah petani di Desa Rambah Hilir Tengah pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Jumlah Petani di Desa Rambah Hilir Tengah**

No	Nama Dusun	Jumlah Petani	Tingkat Pendidikan		
			SD	SMP	SMA
1.	Rimba Jaya	9	4	5	0

2.	Aur Betung	20	5	8	7
3.	Teluk Riti	8	2	5	1
4.	Muara Nikum	10	2	5	3
5.	Muara Nikum Liposos 1	7	1	4	2
6.	Muara Nikum Liposos 2	5	2	3	0
Jumlah		59	16	30	13

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025.

Berdasarkan data jumlah petani dan tingkat pendidikan petani di Desa Rambah Hilir Tengah pada Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah petani di Desa Rambah Hilir Tengah berjumlah 59 orang dan kebanyakan tingkat pendidikannya adalah SMP, bahkan ada yang lulusan SD, serta tidak ada petani yang lulusan sarjana.

Menurut Andi *et al.*, (2024) petani unggul diharapkan dapat menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Namun, untuk mencapai status ini, diperlukan peningkatan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, termasuk pelatihan dan pendidikan yang lebih baik. Sama halnya dengan penelitian Wuli (2023) menyatakan bahwa petani unggul memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, yang memungkinkan petani untuk mengadopsi teknologi dan praktik pertanian modern. Sedangkan fenomena yang terjadi adalah rendahnya pendidikan petani di desa Rambah Hilir Tengah yang dapat mengakibatkan minimnya pengetahuan petani. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah petani yang belum memiliki keterampilan, kemampuan, maupun potensi yang optimal dalam menjalankan dan mengelola kegiatan pertanian secara efektif.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat berkembang di tengah masyarakat sejalan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan nasional dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara (Al Azis, 2022). Desa merupakan aset strategis dalam pembangunan di berbagai sektor, seperti sosial, politik, budaya, dan ekonomi, serta berperan sebagai fondasi utama dalam pengembangan sumber daya

manusia sebelum beralih ke ranah pemerintahan pusat, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat guna meningkatkan efektivitas dan eksistensinya (Wasdi, 2022). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam sektor pertanian. Dalam konteks menciptakan petani unggul, pemerintah desa berperan dalam membuat kebijakan yang mendukung inovasi pertanian, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani, serta menyediakan bantuan modal dan sarana pertanian. Dengan demikian, pemerintah desa berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pertanian (Raintung *et al.*, 2021).

Pemerintah telah berupaya melakukan pembalikan kualifikasi petani agar menjadi lebih terdidik dan terampil, sehingga mampu menerapkan modernisasi pertanian melalui pemberdayaan masyarakat petani (Andi *et al.*, 2024). Pemberdayaan masyarakat petani adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan petani melalui program-program pemerintah desa, seperti penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan yang intensif, penyediaan fasilitas dan sarana pertanian, serta bantuan modal untuk mendukung usaha tani (Al Azis, 2022). Petani dalam hal ini adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam membentuk serta mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualitas.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah?
2. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan Masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah?
3. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah?

4. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat petani dalam menciptakan petani unggul di Desa Rambah Hilir Tengah?
5. Bagaimana kondisi ketahanan pangan masyarakat di Desa Rambah Hilir Tengah?

## KAJIAN PUSTAKA

### Peran Pemerintah Desa

Istilah “peran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Raintung *et al.* (2021) Peran merupakan suatu bentuk tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak tertentu untuk dijalankan oleh individu sesuai dengan status yang dimilikinya, sehingga keberadaan peran tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang telah menetap dan memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam sekitarnya, dengan tujuan utama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup serta mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal (Sugiman, 2018).

Menurut Raintung *et al.* (2021) terdapat tiga indikator peran pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yaitu:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator, yaitu peran pemerintah sebagai pelaksana sekaligus pendorong bagi masyarakat dalam mengarahkan dan menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan.
2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator, merujuk pada kapasitas pemerintah dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan dan kegiatan sosial.
3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator, merupakan menciptakan kondisi yang mendukung dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan, serta berperan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, peran ini juga bertujuan untuk

mengoptimalkan berbagai aktivitas pembangunan di tingkat daerah secara efektif dan berkelanjutan.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Raintung *et al.* (2021), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Sihombing *et al.* (2021), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Ini mencakup kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan, dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan yang sudah ada, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi, dan sosial.

### **Petani Unggul**

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), petani adalah individu yang mengelola usaha pertanian-baik berupa tanaman pangan maupun tanaman perkebunan rakyat-dengan menanggung risiko sendiri dan bertujuan untuk dipasarkan, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap melalui sistem sewa, kontrak, atau bagi hasil. Sementara itu, individu yang bekerja di lahan pertanian milik orang lain dengan imbalan upah (buruh tani) tidak termasuk dalam kategori petani. Kata 'unggul' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, dan sebagainya) daripada yang lain-lain; utama (terbaik, terutama).

Dapat disimpulkan bahwa petani unggul merupakan petani yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan petani lainnya dalam mengelola usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan. Petani unggul mampu menghasilkan hasil tani yang berkualitas tinggi, produktivitas optimal, dan menjalankan praktik pertanian yang inovatif, berdaya saing, serta berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menjadi faktor utama dalam

mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah dan persaingan global (Wuli, 2023).

### **Ketahanan Pangan**

Berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, n.d.).

Program kerja Presiden tahun 2020-2024 difokuskan pada 5 (lima) sasaran prioritas yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, investasi, dan penggunaan anggaran. Sasaran prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan ketahanan pangan dan gizi adalah infrastruktur dan sumberdaya manusia (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/ Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambah Hilir Tengah. Informan pada penelitian ini adalah 3 orang aparatur pemerintah desa dan 3 Orang petani yang ada di Desa Rambah Hilir Tengah yang memiliki keterlibatan langsung dalam program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dan mengetahui secara rinci kebijakan, pelaksanaan, dan dampak program pemberdayaan di bidang pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan**

##### **1) Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan bahwa “kebijakan yang diterapkan sebagian besar bersumber dari

arahan pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk subsidi pupuk dan bantuan bibit. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah desa berinisiatif melakukan musyawarah bersama kelompok tani untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Forum-forum ini, seperti musyawarah desa atau rapat kelompok tani, digunakan untuk menyampaikan aspirasi petani secara langsung". Bapak Jasrul juga menekankan pentingnya keterlibatan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam merumuskan kebijakan pertanian yang berbasis kebutuhan lapangan. (Hasil wawancara dengan Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah, Senin 21 April 2025).

Selain itu, menurut Bapak Ibnu Kamal, Bapak Muhammad Syukur, Dan Ibu Asnira Wati selaku petani menyatakan bahwa "masyarakat kurang mengetahui tentang aturan yang jelas mengenai pedoman pemberdayaan kepada masyarakat petani. Akan tetapi, beberapa kebutuhan dan penunjang masyarakat dalam bertani telah direalisasikan". (Hasil wawancara pada tanggal 24, 25, 26 April 2025)

Meskipun kebijakan berasal dari tingkat kabupaten atau provinsi, desa berfungsi sebagai pelaksana teknis yang menentukan siapa saja penerima bantuan berdasarkan pendataan dan verifikasi di lapangan. Menurut Bapak Iskandar selaku Kepala Dusun Aur Betung menyatakan bahwa "kepala dusun dan RT memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penerima bantuan tepat sasaran". (Wawancara dengan bapak Iskandar selaku Kepala Dusun Aur Betung, Rabu 23 April 2025).

## 2) Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah desa memiliki peran dalam menggerakkan dan mendorong masyarakat tani agar aktif berpartisipasi dalam program pertanian dan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan bahwa "pemerintah desa pernah mengadakan sosialisasi kepada petani melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bersama perangkat desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sosialisasi ini mencakup program bantuan, tata cara penggunaan pupuk, waktu tanam yang baik, hingga edukasi penggunaan alat pertanian sederhana, meskipun belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada semua kelompok tani". (Hasil wawancara dengan Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah, Senin 21 April 2025)

Menurut Bapak Herman Pelani selaku sekretaris desa, pemerintah desa juga mencoba membangun semangat gotong royong dengan mengajak masyarakat bekerja sama saat musim tanam atau saat pembangunan sarana pertanian, seperti jalan usaha tani. Dinamisasi ini kadang dilakukan melalui pendekatan informal-seperti komunikasi antar tokoh masyarakat atau kunjungan langsung ke lahan tani oleh perangkat desa. (Hasil wawancara dengan bapak Herman Pelani selaku Sekretaris Desa Rambah Hilir Tengah, Senin 21 April 2025).

Namun, keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan yang dirasakan petani. Ibu Asnira Wati selaku petani “berharap adanya pelatihan rutin yang difasilitasi langsung oleh pemerintah desa agar pemahaman dan keterampilan petani bisa terus ditingkatkan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Asnira wati selaku petani, Sabtu 26 April 2025)

Meskipun demikian, langkah-langkah kecil yang dilakukan pemerintah desa sudah cukup memberi dorongan semangat kepada petani untuk mencoba metode bertani yang lebih efisien dan produktif.

### 3) Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran fasilitator dijalankan pemerintah desa dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan petani. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan bahwa “pemerintah desa telah menyalurkan sejumlah bantuan berupa pupuk, alat semprot, bibit, hingga pembangunan jalan usaha tani”. Bapak Iskandar Selaku Kepala Dusun Aur Betung menyatakan bahwa “bantuan diberikan berdasarkan data kelompok tani yang dikumpulkan oleh kepala dusun dan diverifikasi oleh RT dan RW”.

Namun, Bapak Ibnu Kamal selaku petani juga mengamati bahwa “bantuan tersebut belum merata, dan sebagian petani masih belum menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Distribusi bantuan kadang menghadapi kendala seperti keterbatasan kuota dan waktu penyaluran yang tidak tepat” (Wawancara dengan bapak ibnu kamal selaku petani, Kamis 24 April 2025). Meskipun begitu, desa telah mencoba membangun transparansi dengan melibatkan perangkat dusun dalam pengawasan distribusi.

Di sisi lain, menurut Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah “tidak semua bentuk fasilitasi dapat diberikan secara langsung oleh pemerintah desa karena keterbatasan anggaran. Sejauh ini, belum tersedia program permodalan seperti kredit usaha tani dari desa. Oleh karena itu, banyak petani masih bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panen dan pemenuhan kebutuhan usaha tani”.

Meskipun begitu, adanya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tani dinilai sangat membantu kelancaran aktivitas pertanian. Pemerintah desa juga terbuka terhadap masukan dari petani dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat kabupaten untuk mendapatkan tambahan dukungan.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan**

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan “peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani masih berjalan secara terbatas. Belum banyak pelatihan atau bimtek (bimbingan teknis) pertanian yang diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah desa. Akses informasi pertanian umumnya diperoleh secara informal, seperti melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) atau sesama petani”. Bahkan, menurut Ibu Asnira Wati “petani mencari informasi secara mandiri melalui internet atau dari pengalaman pribadi”.

Hal ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan yang sistematis belum berjalan maksimal. Meskipun ada keinginan untuk belajar dan meningkatkan keterampilan, keterbatasan sarana pelatihan dan minimnya tenaga pendamping menjadi kendala. Dengan kata lain, pemberdayaan dalam bentuk pendidikan nonformal dan penyuluhan teknis masih memerlukan perhatian dan penguatan.

### **2) Akses terhadap Sumber Daya Produksi**

Akses petani terhadap sumber daya produksi seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Syukur, Dan Ibu Asnira Wati selaku petani, informan menyatakan bahwa “beberapa petani telah mampu membeli pupuk dan bibit secara mandiri, namun petani masih mengharapkan bantuan dari pemerintah desa maupun instansi pertanian kabupaten”. (Hasil wawancara pada tanggal 24, 25, 26 April 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Syukur selaku petani menyatakan bahwa “permasalahan utama yang dihadapi petani adalah mahal nya harga sarana produksi dan keterbatasan modal. Belum adanya lembaga keuangan desa seperti koperasi tani atau kredit mikro menyebabkan sebagian besar petani kesulitan untuk mengembangkan usaha secara mandiri”. Selain itu, Bapak Ibnu Kamal menyatakan “hasil panen sering kali dijual ke tengkulak dengan harga rendah karena tidak adanya sistem pemasaran kolektif atau wadah koperasi yang menampung hasil panen mereka”.

Dengan demikian, meskipun ada dukungan berupa alat dan bibit, akses terhadap sumber daya ekonomi yang berkelanjutan masih tergolong lemah. Hal ini menjadi hambatan besar dalam proses pemberdayaan petani menuju kemandirian.

### 3) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan “partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan telah difasilitasi melalui forum-forum resmi desa, seperti musyawarah dusun (musdus) atau musyawarah desa (musdes)”. Dalam forum tersebut, petani diundang untuk menyampaikan aspirasi terkait pertanian dan pembangunan desa. Keikutsertaan petani dalam musyawarah tersebut dilakukan baik secara langsung maupun melalui perwakilan seperti kepala dusun atau ketua kelompok tani.

Namun demikian, Bapak Ibnu Kamal menyatakan bahwa “tidak semua petani dapat hadir dalam setiap musyawarah. Beberapa kendala seperti kesibukan bekerja di ladang atau kurangnya informasi tentang jadwal musyawarah menyebabkan keterlibatan petani belum optimal”. Meskipun suara mereka tetap dihimpun melalui perwakilan, partisipasi langsung menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani.

### 4) Kemandirian Ekonomi

Dalam hal kemandirian ekonomi, menurut Bapak Herman Pelani selaku sekretaris desa menjelaskan bahwa “sebagian petani telah mulai menunjukkan kemandirian dengan memperluas lahan, membeli alat semprot sendiri, atau melakukan diversifikasi usaha pertanian. Namun secara umum, menurut Bapak Iskandar selaku kepala dusun Aur Betung “ketergantungan pada bantuan pemerintah masih tinggi. Masih banyak petani yang belum

memiliki akses permodalan mandiri atau kemampuan manajerial untuk menjalankan usaha tani sebagai bentuk wirausaha". Ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi petani masih dalam tahap awal, dan membutuhkan dukungan lanjutan melalui pelatihan usaha tani, akses kredit, dan penguatan kelembagaan kelompok tani.

#### 5) Penguatan Jaringan Sosial dan Kelembagaan

Dalam konteks penguatan kelembagaan, kelompok tani di desa seperti Tani Maju telah menjadi wadah interaksi dan kolaborasi antar petani. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iskandar selaku kepala dusun Aur Betung "kelompok tani "Tani Maju" difasilitasi pemerintah desa dalam bentuk bantuan peralatan dan pengelolaan informasi pertanian. Bapak Ibnu kamal sebagai anggota kelompok tani "Tani Maju" menyatakan bahwa antaranggota kelompok tani saling bertukar informasi terkait metode tanam, pemupukan, hingga cara mengatasi hama". Hal ini menunjukkan bahwa ikatan sosial antar petani cukup kuat. Namun, pengembangan jaringan eksternal seperti kerja sama dengan koperasi atau pasar tani masih sangat minim. Pemerintah desa dinilai perlu memperkuat posisi kelompok tani tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi lokal melalui pelatihan organisasi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani.

#### 6) Peningkatan Kualitas Hidup

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan bahwa "secara bertahap, ada perubahan positif dalam pola hidup masyarakat petani. Selain beralih dari satu jenis tanaman ke sistem pertanian campuran, beberapa keluarga mulai lebih memperhatikan kebutuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan hasil panen sayur-mayur untuk konsumsi sendiri". Selain itu, Bapak Ibnu Kamal selaku petani menyatakan bahwa "dengan hasil pertaniannya sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga lulus SMA". Namun, peningkatan kualitas hidup ini belum merata di seluruh kalangan petani. Masih ada keluarga yang menggantungkan pendapatan sepenuhnya dari hasil panen tanpa diversifikasi ekonomi lain, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Asnira Wati juga selaku petani bahwa "pertanian yang dilakukan masih sama". Kegiatan kesehatan masyarakat seperti posyandu dan edukasi gizi telah dilakukan, tetapi kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat masih rendah.

### 3. Petani Unggul

#### 1) Kepintaran dan Kecakapan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan “bahwa petani di desa menunjukkan kecakapan dalam menjalankan praktik pertanian sehari-hari, seperti menentukan waktu tanam, menggunakan alat semprot, hingga menjaga kondisi tanaman”. Namun, berdasarkan pernyataan petani yaitu Bapak Ibnu Kamal, Bapak Muhammad Syukur, dan Ibu Asnira Wati “kecakapan ini lebih bersifat praktis dan diperoleh dari pengalaman turun-temurun”. Tidak semua petani dapat menjelaskan alasan teknis di balik tindakan yang mereka lakukan. Meskipun demikian, kemampuan mereka dalam bertani cukup tangguh dalam konteks lokal.

#### 2) Pendidikan dan Keterampilan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iskandar selaku kepala dusun Aur Betung menyatakan bahwa “tingkat pendidikan petani di desa sebagian besar masih rendah, umumnya hanya sampai jenjang SD dan SMP. Hanya sebagian kecil yang menamatkan SMA atau pendidikan kejuruan”. Meskipun begitu, berdasarkan wawancara dengan Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan “beberapa petani memiliki keterampilan teknis hasil pengalaman lapangan dan belum adanya pelatihan teknis khusus yang diberikan pemerintah”. Minimnya akses terhadap pelatihan formal menyebabkan keterampilan modern, seperti pertanian organik, penggunaan alat pertanian canggih, atau sistem tanam berkelanjutan, belum banyak dikuasai.

#### 3) Kemampuan Manajerial

Dalam aspek manajerial, sebagian petani sudah mengelola lahannya sendiri dan membuat keputusan terkait jenis tanaman serta waktu tanam. Namun, menurut Bapak Herman Pelani selaku sekretaris desa “pengelolaan hasil panen, pencatatan biaya, hingga perencanaan keuangan usaha tani belum dilakukan secara sistematis”. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan bahwa “belum ada pelatihan manajemen usaha tani atau pembinaan kewirausahaan di tingkat kelompok tani karena pelatihan tersebut belum dibutuhkan oleh petani”.

#### 4) Daya Saing

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan, menyatakan bahwa “hasil pertanian memiliki daya saing yang tinggi, namun dalam hal akses pasar masih rendah”. Hasil pertanian dijual ke tengkulak dengan harga yang ditentukan oleh pembeli. Tidak adanya koperasi atau akses pasar alternatif membuat petani sulit bersaing dalam harga. Para petani juga belum terbiasa dengan standar kualitas atau diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai jual.

#### 5) Akses terhadap Informasi dan Modal

Berdasarkan pernyataan Bapak Muhammad Syukur selaku petani menyatakan bahwa “akses informasi petani diperoleh dari media sosial dan diskusi informal antar petani”. Selain itu, menurut Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah “belum ada sistem informasi pertanian yang terstruktur di desa. Akses terhadap modal juga masih terbatas, belum tersedia lembaga keuangan mikro berbasis desa”. Petani yang membutuhkan dana sering kali bergantung pada tengkulak atau sistem pinjaman pribadi yang tidak menguntungkan.

#### 6) Inovasi dan Teknologi

Sebagian petani mulai menunjukkan minat terhadap penggunaan teknologi, seperti alat semprot dan pupuk organik. Namun, inovasi lainnya seperti pertanian hidroponik, sistem tanam tumpangsari modern, atau pemanfaatan media digital untuk promosi hasil pertanian belum dikenal luas. Kurangnya pelatihan dan minimnya contoh nyata di lapangan menjadi penghambat utama. Petani cenderung mengandalkan cara konvensional yang dianggap lebih aman dan mudah.

### 4. Ketahanan Pangan

#### 1) Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih

Berdasarkan pernyataan informan, sebagian besar kebutuhan pangan rumah tangga-khususnya beras dan sayur-mayur masih dapat dipenuhi dari hasil pertanian sendiri. Namun, kebutuhan pangan lain seperti lauk-pauk, minyak, dan makanan tambahan tetap dibeli dari pasar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan pangan pokok cukup, rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih belum sepenuhnya terpenuhi, terutama untuk pangan bergizi seimbang.

#### 2) Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Informan menyatakan bahwa sebagian masyarakat desa masih memiliki pendapatan yang rendah dan hidup dalam kondisi yang pas-pasan. Petani kecil yang tidak memiliki lahan sendiri atau hanya menggarap lahan sempit sering kali mengalami kesulitan ekonomi, terutama ketika hasil panen gagal atau harga jual turun. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk desa yang secara ekonomi masuk kategori miskin, yang berpengaruh langsung terhadap akses dan kualitas konsumsi pangan mereka.

### 3) Persentase Rumah Tangga yang Menghabiskan Pengeluaran untuk Pangan >65% dari Total Pengeluaran

Dari hasil reduksi wawancara, informan menyatakan bahwa sebagian besar penghasilan rumah tangga petani dihabiskan untuk kebutuhan pangan harian. Hal ini mencerminkan bahwa persentase pengeluaran untuk pangan sangat tinggi, melebihi 65% dalam banyak kasus, yang menandakan bahwa ketahanan ekonomi rumah tangga masih rentan.

### 4) Persentase Rumah Tangga tanpa Akses Listrik

Secara umum, hampir seluruh rumah tangga di desa telah menikmati akses listrik. Informan mengatakan bahwa akses listrik sudah merata, meskipun masih ada beberapa rumah tangga di wilayah terpencil yang mengalami gangguan pasokan atau keterbatasan daya.

### 5) Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun

Berdasarkan hasil reduksi wawancara dengan informan, diketahui bahwa mayoritas perempuan usia di atas 15 tahun di desa telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Beberapa bahkan melanjutkan ke pendidikan tinggi meskipun jumlahnya sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan di desa sudah cukup baik, dan mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi perempuan.

Informan menyatakan bahwa tingginya partisipasi pendidikan ini berdampak positif terhadap peran perempuan dalam rumah tangga, khususnya dalam aspek pengelolaan pangan, pemahaman terhadap gizi keluarga, serta pola pengasuhan anak yang lebih baik. Perempuan lulusan SMA dinilai lebih cepat menangkap informasi dari penyuluhan posyandu, lebih terbuka terhadap edukasi kesehatan, dan memiliki kemampuan membaca

serta memahami informasi dari media, termasuk brosur kesehatan, media sosial, atau siaran desa.

Namun, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa meskipun rata-rata lama sekolah sudah cukup tinggi, penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari masih bervariasi. Hal ini tergantung pada kebiasaan keluarga, kondisi ekonomi, serta dukungan lingkungan. Misalnya, dalam praktik konsumsi pangan, masih banyak keluarga yang fokus pada karbohidrat tanpa melengkapi dengan sumber protein dan sayuran secara seimbang. Oleh karena itu, pendidikan formal perlu disertai dengan edukasi lanjutan yang aplikatif, terutama terkait pengelolaan pangan sehat dan pencegahan stunting.

#### 6) Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

Akses terhadap air bersih di desa cukup bervariasi. Informan menyatakan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki sumur gali sendiri atau menggunakan sumur bor, serta di beberapa dusun sudah ada sistem PAM yang disediakan pemerintah desa.

#### 7) Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan di desa masih sangat terbatas. Berdasarkan pernyataan informan, desa hanya memiliki satu bidan dan beberapa kader posyandu. Petugas kesehatan dari puskesmas jarang melakukan kunjungan rutin kecuali ada program tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah, yang berimplikasi pada minimnya pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan gizi.

#### 8) Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah menyatakan bahwa “masih terdapat beberapa balita di desa terindikasi mengalami stunting” meskipun jumlah pastinya tidak disebutkan. “Program posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT) sudah berjalan. Pola asuh dan rendahnya pemahaman gizi masih menjadi tantangan”.

#### 9) Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibnu Kamal selaku petani menyatakan bahwa “kalau tidak bekerja berat banyak yang sehat sampai tua, tetapi kalau kerja terus di kebun cepat lelah”. Secara tidak langsung, informan menyinggung bahwa usia hidup masyarakat

cukup panjang, banyak warga lanjut usia yang masih aktif bertani. Namun demikian, angka harapan hidup tidak hanya ditentukan oleh umur panjang, tetapi juga oleh kualitas hidup. Akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi masih terbatas, sehingga meski masyarakat hidup hingga usia lanjut, kualitas hidup dan harapan hidup sehat masih menjadi tantangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan keterangan bahwa pemerintah desa Rambah Hilir Tengah pada aspek regulator tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan masyarakat petani, melainkan pemerintah desa merealisasikan aturan yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat (hasil wawancara Kepala Desa Rambah Hilir Tengah tanggal 21 April 2025). Sehingga berakibat pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang aturan yang jelas mengenai pedoman pemberdayaan kepada masyarakat petani (hasil wawancara dengan petani). Sementara regulasi mengenai pemberdayaan masyarakat petani telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat. Hasil wawancara terhadap salah satu informan mengatakan bahwa pemerintah desa mengambil kebijakan seperti melakukan kerjasama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mendukung pemberdayaan Masyarakat petani.

Peran pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah berperan menetapkan kebijakan strategis untuk menciptakan keseimbangan dalam proses pembangunan nasional. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan pemberdayaan. Selain itu, menurut Raintung *et al.* (2021) peran pemerintah sebagai regulator artinya menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (Menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan).

Pemerintah desa tidak hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah (seperti subsidi pupuk dan bantuan bibit), tetapi juga berperan aktif dalam menyesuaikan implementasi kebijakan tersebut melalui forum musyawarah bersama kelompok tani. Hal yang sama juga dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh

Raintung *et al.* (2021) pemerintah desa Mobuya membentuk Gapoktan agar masyarakat petani dapat diberdayakan sehingga dapat dikatakan peran pemerintah sebagai regulator di desa Mobuya sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pemerintah desa Mobuya juga menjalankan aturan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat.

### **Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan wawancara kepada seluruh informan, ditemukan bahwa belum secara keseluruhan sub indikator yang ada yakni sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan dikatakan optimal. Karena terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga pendamping dan minimnya pelatihan teknis. Sementara itu, kegiatan sosialisasi dilakukan perangkat desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sosialisasi dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Terkait kegiatan kunjungan lapangan, pemerintah desa bahkan menerapkan pendekatan informal seperti komunikasi langsung dan kunjungan ke lahan pertanian untuk membina hubungan dan memperkuat semangat kolaboratif. Akan tetapi, pemerintah desa belum optimal atau berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan. Meskipun terdapat kendala, langkah-langkah yang telah dilakukan mampu memberikan motivasi awal kepada petani untuk mencoba teknik pertanian yang lebih efisien dan produktif.

Peran pemerintah sebagai dinamisator merujuk pada upaya pemerintah dalam memberikan stimulasi atau dorongan kepada masyarakat agar aktif berperan serta dalam proses pembangunan, serta turut menjaga dan meningkatkan dinamika pembangunan di wilayahnya. Selain itu, menurut Raintung *et al.* (2021) dalam pelaksanaan peran sebagai dinamisator pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Berdasarkan penelitian Raintung *et al.*, (2021) hal yang menyebabkan tidak optimalnya peran pemerintah desa sebagai dinamisator yaitu partisipasi dari anggota kelompok tani sendiri dalam kegiatan kelompok tani seperti penyuluhan dan pelatihan masih sangatlah rendah dilihat dari kehadiran masyarakat yang sangat sedikit.

## **Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani**

Pemerintah desa di Desa Rambah Hilir Tengah telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani, bantuan yang telah disalurkan berupa pupuk, bibit, alat semprot, serta pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani. Hal ini merupakan wujud nyata dari berjalannya peran fasilitator pemerintah desa kepada para petani. Namun, keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam perluasan bentuk fasilitasi, terutama terkait program permodalan seperti kredit usaha tani yang belum dapat difasilitasi langsung oleh desa (hasil wawancara dengan bapak Jasrul selaku Kepala Desa dan bapak Herman Pelani selaku sekretaris Desa Rambah Hilir Tengah tanggal 21 April 2025).

Peran pemerintah sebagai fasilitator dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam mengoptimalkan kegiatan pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Selain itu, menurut Al Azis (2022) sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pembinaan dan pendanaan/permodalan.

Sebagaimana temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Al Azis (2022), peran pemerintah desa sebagai fasilitator masih belum optimal, meskipun telah disediakan berbagai fasilitas seperti traktor dan sarana prasarana pengelolaan limbah lahan. Namun demikian, Pemerintah Desa Kertamukti dinilai masih kurang memberikan perhatian terhadap pemberian bantuan modal bagi masyarakat petani, sehingga tingkat kesejahteraan petani di desa tersebut belum mengalami peningkatan yang signifikan dan masyarakat petani masih berada dalam kondisi kemiskinan.

## **Dampak Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Menciptakan Petani Unggul**

Berdasarkan pada temuan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah masih dalam tahap pembentukan dan belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan petani unggul, seperti:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani masih bersifat terbatas dan informal.

2. Partisipasi petani dalam pengambilan keputusan memang telah difasilitasi melalui forum-forum desa, namun belum optimal dari segi keterlibatan langsung.
3. Sudah terdapat inisiatif petani untuk mandiri dan berkolaborasi dalam kelompok tani. Namun, peran kelompok tani masih sebatas penerima bantuan, belum berkembang menjadi institusi yang mampu memfasilitasi usaha tani secara profesional.
4. Kualitas hidup petani secara umum menunjukkan peningkatan, namun peningkatan ini belum menyentuh seluruh lapisan petani.

Menurut Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.).

#### **Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat Di Desa Rambah Hilir Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kondisi ketahanan pangan masyarakat di Desa Rambah Hilir Tengah berada pada tingkat yang masih rentan dan belum sepenuhnya kuat. Masih terdapat sejumlah kelemahan struktural yang masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merata, seperti:

1. Kebutuhan konsumsi normatif belum sepenuhnya tercapai, seperti ketergantungan terhadap pembelian pangan tambahan seperti lauk-pauk, minyak, dan makanan bergizi.
2. Tingginya angka pengeluaran rumah tangga untuk pangan yang melebihi 65% dari total pendapatan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih lemah.
3. Keberadaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketergantungan terhadap hasil pertanian yang fluktuatif.
4. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di desa.
5. Masih ditemukannya balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan

dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, n.d.).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek regulator khususnya mengenai aturan atau kebijakan pemerintah desa tentang pemberdayaan masyarakat petani, pemerintah desa tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan masyarakat petani, melainkan hanya merealisasikan aturan yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang aturan yang jelas mengenai pedoman pemberdayaan kepada masyarakat petani.
2. Pada aspek dinamisator belum secara keseluruhan sub indikator yang ada yakni sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan dikatakan optimal. Terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga pendamping dan minimnya pelatihan teknis, serta pemerintah desa belum optimal atau berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan. Sementara itu, kegiatan sosialisasi dilakukan perangkat desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sosialisasi dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
3. Pada aspek Fasilitator, ketersediaan bibit unggul, pupuk, serta sarana dan prasarana produksi lainnya, hal ini merupakan wujud nyata dari berjalannya peran fasilitator pemerintah desa kepada para petani. bahwa pemerintah desa sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, meskipun masyarakat petani masih mendapatkan beberapa kendala.
4. Pemberdayaan masyarakat petani di Desa Rambah Hilir Tengah masih dalam tahap pembentukan dan belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan petani unggul.
5. Kondisi ketahanan pangan masyarakat di Desa Rambah Hilir Tengah berada pada tingkat yang masih rentan dan belum sepenuhnya kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Andi, D., Wiguna, M., & Yunanti, S. (2024). *Peningkatan Manajemen Operasional dan SDM Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa Rancasumur*. 13–17.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/ Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. (2019). *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan Dan Gizi 2020-2024*.
- Economist Impact. (2022). *Global Food Security Index 2022*. <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.-a). *Desa*. Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). [https://kbbi.web.id/desa#google\\_vignette](https://kbbi.web.id/desa#google_vignette)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.-b). *Peran*. Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). <https://kbbi.web.id/peran>
- Nelsi, M., Akbar, I. R., & Kristianti, L. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Guna Mencapai Desa Mandiri Sejahtera Di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopu, Kabupaten Serang-Banten. *Abdi Jurnal Publikasi*, 2(6), 255–263. <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/AJP/index>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, Pub. L. No. 17. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5581/pp-no-17-tahun-2015>
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Sihombing, A., Silalahi, R. H., & Tampubolon, F. R. (2021). Peran Pemerintah Kabupaten Toba dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 200–208.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Bina Mulia Hukum*, 7(1), 84–85.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 06. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pub. L. No. 18. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- Wasdi. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia di Desa Pedangkamulyan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.
- Wuli, R. N. (2023). Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan. *Jurnal Pertanian Unggul*, 2(1), 1–15.